BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba'i* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ba'a – yabi'u – bay'un* yang berarti “menjual”. Sedangkan kata “beli” dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'*, yang merupakan masdar dari kata kerja *syara – syasri – syiraa'an*, yang berarti “membeli sesuatu”.¹² Secara istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i*, yang memiliki pengertian menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹³ Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung makna menjual sekaligus membeli, atau dengan kata lain, transaksi jual beli.

Selain istilah *al-ba'i*, terdapat beberapa sinonim lain yang juga merujuk pada konsep jual beli, yaitu *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Istilah *at-tijarah* sendiri sering disebut dalam Al-Qur'an, yang menegaskan pentingnya aktivitas perdagangan dan jual beli dalam kehidupan manusia. salah satunya terdapat dalam Surat Fathir ayat 29¹⁴ :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالْيَقِينَ زَكَاةً وَأَقْرَبُوا وَجْهًا
لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ وَلَا يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا لِيُحْسِنُوا الصَّلَاةَ وَالْيَقِينَ زَكَاةً وَأَقْرَبُوا وَجْهًا
أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang membaca Kitab Allah, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi." (QS. Fathir: 29)

Dalam konteks ini, jual beli tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai aktivitas yang diatur secara syar'i dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar transaksi tersebut sah dan membawa keberkahan. Dengan demikian, jual beli dalam perspektif Islam bukan sekadar pertukaran barang

¹² Mahmud Yunus, Kamus Arab - Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm 197.

¹³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 20

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan terjemahan

atau jasa, melainkan sebuah akad yang mengandung nilai keadilan, kejujuran, dan saling ridha antara penjual dan pembeli, yang dilandasi oleh aturan-aturan syariah.

Terdapat beragam definisi mengenai jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, meskipun pada dasarnya seluruh definisi tersebut memiliki substansi dan tujuan yang serupa. Setiap ulama memberikan penekanan yang berbeda dalam merumuskan pengertian jual beli, namun inti makna yang terkandung tetap berkisar pada pertukaran kepemilikan secara sukarela. Menurut ulama dari mazhab Hanafiyah, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta atau benda dengan harta lainnya melalui cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sementara itu, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai proses pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau pemindahan hak milik dengan imbalan yang sah menurut hukum.¹⁵ Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam karyanya *Al-Majmu'*, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang dilakukan untuk tujuan kepemilikan.¹⁶

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan oleh para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli pada dasarnya adalah suatu proses tukar-menukar atau peralihan hak milik dari satu pihak ke pihak lain dengan adanya pengganti atau kompensasi yang disepakati bersama. Esensi utama dari praktik jual beli adalah adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling menukar barang atau benda yang memiliki nilai ekonomi, di mana proses tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, jual beli bukan hanya sekadar transaksi materi, melainkan juga mengandung unsur keadilan, kejujuran, dan kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap transaksi jual beli agar tercipta keadilan dan keberkahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Kegiatan ini menjadi kebutuhan pokok karena

---

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010) hlm 67

¹⁶ Rachmat Syafiei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia) 2001. hlm 74

manusia membutuhkan berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga berfungsi sebagai bentuk interaksi sosial yang mempererat hubungan antar sesama manusia melalui mekanisme tolong-menolong dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, Islam memandang jual beli sebagai aktivitas yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat.

Dasar hukum jual beli dalam Islam dapat ditemukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang halal dan diperbolehkan, berbeda dengan praktik riba yang diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Dalam berbagai ayat, Allah SWT mengatur tata cara jual beli agar transaksi tersebut berlangsung adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, hadits-hadits Nabi juga memberikan pedoman etika dan tata cara pelaksanaan jual beli yang baik, seperti kejujuran, keterbukaan informasi, dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Dengan landasan hukum yang kuat ini, jual beli dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai ibadah yang mengandung nilai moral dan sosial. Oleh sebab itu, setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan agar sah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

a. Al Qur'an

Salah satu dasar hukum yang mengatur jual beli dalam Islam dapat ditemukan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ كَلَّمُوا الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ قَلْبَهُ مَا لَمْ
 تَأْتِرْهُ إِلَّا إِلَىٰ دُورٍ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَهْبُتْ أَلْأَرْ ۗ ثُمَّ فِيهَا جُلُودٌ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ دَمَكُمْ كَانَ يَكُومًا رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)¹⁸

b. Hadist tentang Jual Beli

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعُ زُلْجَانٌ حُرًّا بِنِقَاتِهِ وَلَا يَتْرَقَا حُرًّا بِرَضِينَا

Artinya : Dari Rifaah bin Rafi' radhiyallāhu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: “Mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik (dibenarkan).” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)¹⁹

Begitu pula dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "التَّاجِرُ أَلْصَدُوقُ الْأَمِينِ مَعَ الرَّبِيِّينَ وَالصَّيْفِيِّينَ وَالْأَشْهَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

Artinya : Rasulullah SAW bersabda “ pedagang yang jujur dan dapat dipercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shidiqin, Syuhada“. Pada dasarnya jual beli hukumnya mubah (boleh) jika dilakukan dengan tuntutan syari’at.²⁰

Hadits ini menegaskan betapa mulianya kedudukan seorang pedagang yang menjalankan usahanya dengan kejujuran dan integritas tinggi. Dalam Islam, jual beli pada dasarnya adalah aktivitas yang diperbolehkan (mubah) selama dilakukan sesuai dengan tuntutan syariat. Artinya, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, tidak mengandung unsur penipuan, riba, atau gharar (ketidakjelasan), serta harus berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, jual beli bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan ibadah yang bernilai tinggi apabila dijalankan sesuai dengan aturan Islam.

c. Ijma' Ulama tentang Hukum Jual Beli

Para ulama fiqih secara umum telah mencapai kesepakatan (ijma') bahwa hukum

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan terjemahan. hlm 59

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 4, Terj Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 223

²⁰ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadith al-Sahihah*, no. 1209;

jual beli adalah mubah, artinya diperbolehkan dalam syariat Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa adanya interaksi dan bantuan dari orang lain. Dalam konteks ini, jual beli menjadi sarana yang sangat penting karena memungkinkan seseorang memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dengan memberikan kompensasi atau imbalan yang setimpal kepada pemilik barang tersebut. Dengan demikian, jual beli tidak hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara adil dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, melalui disyariatkannya jual beli, manusia dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara halal dan teratur, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan harmonis dan berkelanjutan. Intinya, manusia tidak dapat hidup secara terpisah dan mandiri tanpa adanya bantuan dan kerja sama dengan sesama manusia, dan jual beli menjadi salah satu bentuk nyata dari kerja sama.²¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar suatu transaksi jual beli dapat dianggap sah menurut syariat Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi secara menyeluruh. Istilah rukun berasal dari kata jamak *arkan*, yang berarti sisi atau pilar yang paling kuat, sedangkan *arkan* dalam konteks akad merujuk pada unsur-unsur esensial yang harus ada secara lahir agar suatu akad dapat terwujud dengan sempurna.²² Sah tidaknya sebuah jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya rukun-rukun tersebut beserta syarat-syarat yang menyertainya. Secara umum, rukun jual beli terdiri dari empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi
2. adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak

---

²¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 54

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 28

3. adanya barang atau objek yang diperjualbelikan
4. adanya nilai tukar atau harga sebagai pengganti barang

Dalam hal persyaratan jual beli, para ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat yang cukup signifikan, terutama dalam menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli menjadi sah. Misalnya, menurut mazhab Hanafiyah, syarat sahnya akad meliputi beberapa aspek, antara lain: syarat *aqid* (pelaku akad) harus berakal dan mumayyiz (mampu membedakan), serta harus lebih dari satu orang; syarat akad harus melibatkan ahli akad yang sah, dan ijab qabul harus sesuai dan dilakukan dalam satu tempat serta waktu yang sama; syarat *ma'qud alaih* (objek akad) harus berupa harta yang ada, kuat, tetap, bernilai, milik sendiri, dan dapat diserahkan; serta syarat pelaksanaan akad (*nafadz*) yaitu benda harus benar-benar dimiliki oleh pelaku akad dan tidak menjadi milik orang lain. Selain itu, akad harus bebas dari cacat seperti ketidakjelasan, paksaan, penipuan, dan kerusakan lainnya yang dapat membatalkan akad.²³

Sementara itu, menurut mazhab Maliki, syarat sah jual beli meliputi: penjual dan pembeli harus dalam keadaan sukarela dan dewasa; tempat akad harus bersatu dan pengucapan ijab qabul tidak terpisah; serta barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, jelas, dan dimiliki oleh penjual atau wakilnya.²⁴ Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, syarat sah jual beli terdiri dari tiga aspek utama, yaitu: syarat *aqid* yang mensyaratkan pelaku akad berakal, dewasa, tidak dipaksa, beragama Islam, dan pembeli bukan musuh; syarat *shighat* yang mengharuskan ijab qabul diucapkan secara langsung, lengkap, dan disertai niat; serta syarat *ma'qud alaih* yang harus berupa barang yang suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri atau wakil, dan jelas diketahui kedua belah pihak.

Lebih rinci, syarat orang yang melakukan akad (*al-muta'qidain*) mencakup: pertama, berakal sehat, yang biasanya diukur dari usia baligh dan kemampuan

---

²³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 76

²⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 81

membedakan baik buruk; kedua, akad dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan; dan ketiga, pelaku akad haruslah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak bisa sekaligus menjadi penjual dan pembeli dalam satu transaksi yang sama. Sedangkan syarat dalam ijab qabul menuntut bahwa orang yang mengucapkannya sudah baligh dan berakal, qabul harus sesuai dengan ijab, dan keduanya harus dilakukan dalam satu majelis yang sama agar akad sah.²⁵

Syarat terkait barang yang diperjualbelikan juga sangat penting, yaitu barang tersebut harus suci (tidak najis atau haram seperti bangkai, babi, dan lain-lain), menjadi milik penjual atau orang yang diberi kuasa, serta memiliki manfaat yang jelas.²⁶ Barang yang tidak bermanfaat, seperti lalat atau nyamuk, tidak dapat dijadikan objek jual beli. Mengenai nilai tukar atau harga, para ulama membedakan antara *as-tsamn* (harga pasar yang berlaku umum) dan *as-si'r* (modal atau harga pokok barang). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan boleh diserahkan pada saat akad atau di kemudian hari dengan ketentuan waktu pembayaran yang pasti. Jika transaksi dilakukan dengan tukar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat.

Secara keseluruhan, terbentuknya akad jual beli yang sah dan mengikat secara hukum Islam mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat akad secara lengkap. Rukun merupakan unsur-unsur fundamental yang membentuk akad sehingga akad tersebut dapat terwujud, sedangkan syarat adalah ketentuan-ketentuan tambahan yang harus dipenuhi agar akad tersebut tidak batal atau rusak. Rukun adalah unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur tersebut yang membentuknya.²⁷ Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, empat rukun utama yang membentuk akad adalah: para pihak yang melakukan akad, pernyataan kehendak kedua belah pihak, objek akad, dan tujuan akad yang sesuai dengan syariat.

---

²⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 83

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 245-246.

²⁷ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm 35.

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli dapat diklasifikasikan berdasarkan keabsahan atau kesahihan akadnya menjadi tiga bentuk utama, yaitu jual beli yang sah (shahih), jual beli yang batal (bathil), dan jual beli yang fasid (cacat).²⁸

a. Jual Beli yang Shahih

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik sah penjual dan tidak terikat dengan hak khiyar (pilihan untuk membatalkan transaksi). Dalam kondisi ini, akad jual beli mengikat kedua belah pihak secara penuh. Contohnya adalah ketika seseorang membeli suatu barang dengan memenuhi semua rukun dan syarat jual beli, barang tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan dipastikan tidak cacat atau rusak, uang telah diserahkan, barang diterima, dan tidak ada lagi hak untuk membatalkan transaksi (khiyar).

b. Jual Beli yang Bathil

Jual beli menjadi bathil apabila salah satu atau seluruh rukun akad tidak terpenuhi, atau akad tersebut pada dasarnya tidak disyariatkan oleh Islam. Contoh jual beli bathil adalah transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh, orang gila, atau jual beli barang-barang yang diharamkan oleh syariat seperti bangkai, darah, babi, dan minuman keras (khamr). Transaksi semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat.

c. Jual Beli yang Fasid

Jual beli fasid adalah akad yang secara prinsip disyariatkan, tetapi terdapat kekurangan atau cacat dalam pelaksanaannya sehingga akad tersebut tidak sempurna. Misalnya, jual beli yang melibatkan barang majhul (tidak jelas spesifikasinya), seperti menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dimaksud jika penjual memiliki beberapa rumah. Dalam pandangan ulama, akad semacam ini tidak mengakibatkan

---

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 138.

perpindahan kepemilikan secara sah.

Dari segi mekanisme penetapan harga, jual beli terbagi menjadi dua jenis.²⁹

a. Jual Beli Musawamah (Tawar-Menawar)

Ini adalah bentuk jual beli yang paling umum, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menawar harga sesuai kesepakatan bersama.

b. Jual Beli Amanah

Dalam jual beli amanah, penjual memberitahukan harga perolehan barang (modal) kepada pembeli. Jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis:

1. Jual beli dengan harga tangguh (*ba'i bitsaman ajil*), yaitu transaksi dengan penetapan harga yang akan dibayar di kemudian hari, biasanya dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai dan dapat dicicil.
2. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkannya secara transparan.
3. Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan mekanisme penawaran dari penjual dan para pembeli yang saling menawar; pembeli dengan tawaran tertinggi memenangkan lelang. Kebalikan dari ini adalah *jual beli munaqadhah*, di mana pembeli mengajukan tawaran untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan harga termurah.

Jual Beli Berdasarkan Bentuk Pertukaran.³⁰

1. Jual Beli As-Salam (Pesanan)

Jual beli as-salam adalah transaksi di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu dengan membayar uang muka atau lunas sebelum barang tersebut dibuat atau dikirim. Bentuk jual beli ini sangat populer dalam sistem pre-order (PO) di toko online.

2. Jual Beli Muqayadhah (Barter)

---

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 174.

³⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 101.

Jual beli muqayadhah adalah sistem tukar-menukar barang dengan barang lain, baik sejenis maupun tidak, misalnya menukar sepeda motor dengan sapi. Sistem barter ini sudah dikenal sejak zaman dahulu kala.

3. Jual Beli Mutlaq

Jenis jual beli ini merupakan kesepakatan masyarakat untuk menggunakan alat tukar tertentu yang sah, seperti uang, untuk memudahkan transaksi jual beli. Seiring perkembangan zaman, alat tukar ini berkembang menjadi uang elektronik atau token digital.

4. Jual Beli Alat Penukar

Ini adalah jual beli yang melibatkan pertukaran alat tukar dengan alat tukar lain, misalnya menukar dolar dengan rupiah, sesuai dengan nilai tukar yang berlaku.

Jual Beli Berdasarkan Akad

1. Akad Jual Beli Lisan

Akad ini terjadi melalui kesepakatan verbal antara penjual dan pembeli. Bagi penyandang tuna wicara, akad dapat dilakukan melalui isyarat yang dimengerti kedua belah pihak.

2. Jual Beli dengan Perantara

Transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga atau perantara, sehingga tidak selalu mengharuskan kedua pihak bertemu langsung.

3. Jual Beli Muathah

Jual beli yang terjadi dengan proses ijab qabul secara langsung, seperti yang biasa terjadi di supermarket atau pusat perbelanjaan.

4. Jual Beli Tebasan atau Borongan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "menebas" berarti memotong atau membuka lahan. sistem tebasan adalah transaksi pembelian hasil tanaman secara keseluruhan sebelum dipanen. Pada masa Rasulullah SAW, jual beli jenis ini dikenal dengan istilah *jizaf*, yang secara etimologi berarti mengambil dalam jumlah banyak.³¹

---

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 145-148.

Secara bahasa, kata *jizaf* berasal dari bahasa Persia yang berarti mengambil dalam jumlah banyak tanpa harus menimbang, menakar, atau menghitung secara rinci.³² Dalam terminologi fiqh, jual beli *jizaf* adalah jual beli barang yang dilakukan secara borongan dengan taksiran, tanpa penimbangan atau penghitungan secara pasti pada saat akad. Barang yang diperjualbelikan biasanya berupa komoditas yang sulit dihitung satu per satu, seperti biji-bijian, buah-buahan, telur, dan hasil panen lainnya. Jual beli *jizaf* menjadi alternatif transaksi yang praktis dan efisien di masyarakat agraris, terutama ketika penjual dan pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah atau berat barang yang akan diperjualbelikan. Dalam konteks ini, taksiran dilakukan berdasarkan pengalaman, pengamatan fisik, dan keahlian penaksir.

Rukun jual beli *jizaf* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu terdiri dari empat unsur utama:

- a. Penjual (Ba'i): Orang yang memiliki barang dan berkehendak menjualnya.
- b. Pembeli (Mustari): Orang yang berkehendak membeli barang tersebut.
- c. Barang yang Dijual (Ma'qud 'Alaih): Objek jual beli harus jelas, halal, dan dapat diserahkan.
- d. Ijab dan Qabul (Sighat): Pernyataan penawaran dan penerimaan yang menunjukkan adanya akad.

Menurut pendapat ulama madzhab Malikiyah dan disepakati oleh madzhab lain seperti Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, syarat sah jual beli *jizaf* meliputi:

1. Objek Harus Bisa Dilihat oleh Mata Kepala

Penjual dan pembeli harus dapat melihat objek jual beli secara langsung pada saat akad atau sebelumnya. Hal ini untuk menghindari *gharar jahalah* (ketidakjelasan objek).

2. Penjual dan Pembeli Tidak Mengetahui Secara Pasti Jumlah atau Berat Barang

Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara pasti takaran, berat, atau

---

³² Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 No. 2 (2022): 95-105.

jumlah barang yang diperjualbelikan. Jika salah satu pihak mengetahui secara pasti, maka jual beli jizaf tidak berlaku dan jual beli biasa yang berlaku.

3. Barang yang Dijual Harus Dalam Jumlah Banyak dan Sulit Dihitung dengan Mudah
Barang yang diperjualbelikan harus dalam jumlah yang cukup besar sehingga sulit untuk dihitung secara rinci, namun tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan taksiran yang wajar.
4. Tempat Penempatan Barang Harus Datar dan Terjaga
Tempat atau permukaan tempat peletakan barang harus datar dan terjaga agar tidak terjadi manipulasi dalam taksiran.
5. Barang Harus Dijaga dan Tidak Boleh Rusak atau Berkurang
Selama masa akad hingga penyerahan, barang harus tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya agar tidak merugikan salah satu pihak.³³
6. Jual Beli Dilakukan atas Barang Secara Partai, Bukan Satuan
Jual beli jizaf hanya diperbolehkan untuk barang yang dibeli secara borongan, bukan satuan. Barang yang dapat ditaksir seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sejenisnya.³⁴

Dasar Hukum Jual Beli Jizaf dalam Hukum Islam

Islam mengatur jual beli secara rinci agar transaksi berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

﴿ أَجِبَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ وَمَا رَزَقْنَاكُمْ مَجْرَأَةً إِلَىٰ أَنْ تُصَلِّتُمْ عَلَيْهَا قُلُوبَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ آيَاتِ اللَّهِ وَلَسَوْفَ يَأْكُلُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِمْ يَوْمَئِذٍ عَظِيمًا ﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)³⁵

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman terkait jual beli jizaf.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau berkata:

---

³³ Abdullah Al-Mushlih. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

³⁴ Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 No. 2 (2022): 95-105.

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan terjemahan. hlm 59

عَدُّنَا خَزْمَةُ بِنِ ۖ عَدُّنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنَا سَلَامُ بْنُ عَبْدِ
 د، أَنَّ أَكْبَاهَةَ قَالَتْ: قَدِمْتُ زَائِلَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَرَوْا
 الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَائِهِ، وَذَلِكَ خِزَامٌ يُضَوِّبُهُ إِلَى الرُّط

Artinya : "Saya pernah melihat orang-orang pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dipukul karena mereka membeli makanan secara taksiran (jizaf) kemudian menjualnya di tempat itu juga. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sebaiknya barang itu dibawa dahulu sebelum dijual kembali.’" (HR. Muslim)³⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa jual beli dengan sistem taksiran diperbolehkan, namun dengan syarat barang yang dibeli secara taksiran harus dipindahkan terlebih dahulu dari tempat asalnya sebelum dijual kembali. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik spekulasi dan penipuan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam konteks jual beli jizaf, hadis ini menjadi rujukan utama yang menegaskan bahwa meskipun pembelian secara taksiran diperbolehkan, penjual tidak diperkenankan langsung menjual kembali barang tersebut di tempat yang sama tanpa terlebih dahulu memindahkan barang tersebut.

Dengan demikian, akad jual beli harus didasarkan pada kepemilikan nyata atas barang yang diperjualbelikan, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau janji semata. Hadis ini juga mengandung pesan penting mengenai kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli, yang merupakan prinsip utama dalam muamalah Islam. Dengan mematuhi ketentuan ini, para pelaku bisnis dapat menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan penipuan yang dilarang dalam syariat.

Menurut Pendapat Ulama imam Ahmad berpendapat bahwa jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli tidak perlu dilakukan secara jizaf.³⁷ Namun jika penjual tidak mengetahui, maka jual beli jizaf menjadi sah dan lazim dilakukan. Mazhab Syafi’i dan ulama lainnya sepakat bahwa objek jual beli harus bisa ditaksir meskipun tidak dihitung secara pasti. Jika objek tidak dapat ditaksir, maka jual beli jizaf tidak boleh dilakukan.

³⁶ HR. Muslim, Kitab Al-Buyu’, Bab Al-Buyu’ Jizaf, no. 1547.

³⁷ Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Ekonomi Syari’ah*, Vol. 1 No. 2 (2022): 95-105.

1. Proses dan Mekanisme Jual Beli Jizaf

a. Kesepakatan dan Akad

Jual beli jizaf diawali dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek dan harga berdasarkan taksiran. Kedua pihak melakukan akad dengan ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan atas transaksi tersebut

b. Penaksiran Objek

Penaksiran dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengamatan fisik terhadap objek, misalnya melihat jumlah buah alpukat di pohon, kualitas biji-bijian, atau volume barang yang akan diperjualbelikan. Penaksiran harus dilakukan secara objektif dan disepakati bersama agar tidak menimbulkan perselisihan.³⁸

c. Serah Terima Barang

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang dapat dilakukan apabila pembeli berada di pelataran atau tanah yang menjadi tempat barang tersebut disimpan. Hal ini untuk memastikan kepemilikan barang telah berpindah secara sah.

B. Jual Beli yang boleh dilakukan dalam Islam

Islam mengenal berbagai macam bentuk jual beli yang diperbolehkan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.³⁹ Beberapa jenis jual beli yang umum dan sesuai dengan syariat antara lain:

1. Jual Beli Musawamah (Tawar-Menawar)

Ini adalah bentuk jual beli yang paling umum, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menawar harga. Proses tawar-menawar ini berlangsung secara sukarela dan berlandaskan kejujuran.

2. Jual Beli Murabahah

Dalam jual beli murabahah, penjual menyebutkan harga pokok barang dan

---

³⁸ Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 No. 2 (2022) hlm 105.

³⁹ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 5-20.

keuntungan yang diinginkan secara transparan kepada pembeli. Transaksi ini sering digunakan dalam pembiayaan syariah, misalnya pembelian rumah atau kendaraan, di mana pembeli mengetahui secara jelas modal dan margin keuntungan penjual.

3. Jual Beli Salam (Pesanan)

Jual beli salam adalah transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Bentuk jual beli ini banyak digunakan dalam perdagangan komoditas dan pertanian, serta semakin berkembang dalam sistem pre-order di toko online.

4. Jual Beli Istishna'

Istishna' adalah jual beli barang yang dibuat berdasarkan pesanan dengan spesifikasi tertentu dan waktu penyerahan yang telah disepakati. Contohnya adalah pembuatan rumah, kendaraan, atau barang manufaktur lainnya.

5. Jual Beli Muqayadhah (Barter)

Barter adalah sistem jual beli dengan pertukaran barang secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Misalnya menukar barang elektronik dengan kendaraan. Barter diperbolehkan selama barang yang ditukar halal dan tidak mengandung unsur penipuan.

6. Jual Beli Muzayyadah (Lelang)

Jual beli lelang adalah transaksi di mana penjual menawarkan barang dan para pembeli saling menawar harga. Barang akan dijual kepada penawar tertinggi. Sistem ini harus dilakukan secara jujur dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian.

7. Jual Beli Amanah

Jual beli amanah adalah transaksi di mana penjual memberitahukan modal dan keuntungan kepada pembeli, dan transaksi dilakukan dengan kepercayaan penuh. Jenis jual beli ini menekankan pada kejujuran dan keterbukaan.

C. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Dalam kajian fiqh muamalah, pengaturan mengenai transaksi jual beli sangat ketat dan selektif. Islam tidak memperbolehkan sembarang jual beli, melainkan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, terdapat

indikator-indikator yang membedakan antara jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, jual beli tersebut bisa dianggap batal atau haram secara hukum Islam.

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya tentang fiqh muamalah, terdapat dua kategori utama jual beli yang dilarang oleh syariat, meskipun secara hukum transaksi jual beli itu mungkin tetap sah, dan kategori lain yang dilarang sekaligus batal secara hukum.⁴⁰ Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa tidak semua jual beli yang terjadi di masyarakat dapat diterima dalam Islam, terutama jika mengandung unsur-unsur yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.

a. Jual Beli yang Terlarang Secara Syariat namun Sah Secara Hukum

Kategori pertama ini mencakup jual beli yang secara syariat dilarang karena mengandung unsur keburukan dari sisi pelaku atau cara transaksi, tetapi secara formal memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga dianggap sah secara hukum. Beberapa contoh jenis jual beli dalam kategori ini adalah:

1. Jual Beli Talaqqi Rukban

Transaksi ini terjadi ketika seseorang membeli barang dengan cara menghadang pedagang yang sedang dalam perjalanan dari desa ke pasar. Praktik ini dilarang Rasulullah SAW karena dapat menyebabkan kenaikan harga barang di pasar dan merugikan pedagang kecil. Misalnya, seorang tengkulak membeli hasil panen petani dengan harga murah di desa, kemudian menjualnya dengan harga tinggi di kota.

2. Jual Beli Najasyi

Najasyi adalah praktik manipulasi harga dengan cara mengatur penawaran palsu. Pedagang bersekongkol dengan seseorang untuk berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi, sehingga menarik pembeli lain untuk ikut menawar dengan harga lebih tinggi. Cara ini dianggap tidak etis dan dilarang karena menimbulkan ketidakadilan.

3. Menawar Barang yang Sedang Ditawar Orang Lain

---

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, IAIN Surakarta Repository, 2019, hlm. 70-85.

Dalam kasus ini, seorang pembeli mencoba mempengaruhi penjual agar menjual barang kepada dirinya dengan harga lebih tinggi, padahal barang tersebut sedang dalam proses tawar-menawar dengan pembeli lain. Praktik ini menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan pihak lain.

4. Menjual di Atas Penjualan Orang Lain

Ini adalah praktik menjual barang yang sama kepada pembeli yang sedang menawar dengan harga lebih rendah, tetapi menawarkan harga lebih tinggi kepada pembeli lain. Hal ini dianggap tidak etis dan termasuk jual beli yang bathil.

b. Jual Beli yang Terlarang dan Batal Hukumnya

Kategori kedua mencakup jual beli yang tidak hanya dilarang secara syariat, tetapi juga batal secara hukum karena tidak memenuhi rukun atau syarat akad.⁴¹ Menurut jumbuh ulama, jual beli jenis ini haram dan tidak sah dalam perpindahan kepemilikan. Beberapa contoh jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah:

1. Jual Beli Barang Najis

Menjual barang yang dinyatakan najis oleh syariat, seperti bangkai, babi, dan minuman keras, adalah haram dan batal. Contohnya adalah menjual anjing untuk dimakan, yang jelas bertentangan dengan hukum Islam.⁴²

2. Jual Beli Madhamin

Ini adalah jual beli sperma hewan pejantan untuk dikawinkan dengan betina, di mana tidak ada jaminan uang kembali jika betina tidak hamil, dan hasil keturunan menjadi milik pembeli sperma. Transaksi ini mengandung unsur ketidakpastian dan tidak diperbolehkan.

3. Jual Beli Mudaqih

Jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan induknya, yang mengandung unsur gharar karena tidak ada kepastian janin tersebut akan lahir dengan baik.

4. Jual Beli Muhaqallah Baqallah

---

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 300-320.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 150-170.

Transaksi jual beli bahan makanan pokok yang masih dalam proses perawatan di ladang atau sawah, di mana pembeli membeli hasil panen yang belum ada secara pasti.

5. Jual Beli Mukhadarah

Menjual hasil panen yang masih menempel di pohon dan belum matang, seperti mangga yang masih hijau atau belum masak.

6. Jual Beli Muammassah

Jual beli yang merugikan pembeli karena adanya unsur tipu daya, misalnya dengan membuat aturan bahwa siapa yang menyentuh barang wajib membelinya.

7. Jual Beli Munabadzah

Mengandung unsur judi, di mana barang yang dipertaruhkan dilempar dan langsung berpindah kepemilikan tanpa melihat spesifikasi barang secara jelas.

8. Jual Beli Muzabanah

Transaksi jual beli barang setengah jadi dengan barang jadi, contohnya menjual rumah yang bahan bakunya masih berupa pohon yang belum ditebang.

9. Jual Beli Bersyarat

Jual beli yang hanya berlaku jika syarat tertentu terpenuhi, misalnya membeli tanah dengan syarat pembeli harus menjual tanah miliknya terlebih dahulu.

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebas (Jizaf)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *menebas* memiliki arti memotong secara kecil-kecil, membersihkan semak-semak, membuka jalan di hutan, atau membuka lahan untuk ditanami. Dalam konteks ekonomi pertanian, menebas juga berarti memborong hasil tanaman seperti padi, jagung, buah-buahan, dan sejenisnya yang belum dipanen secara fisik. Dalam praktik muamalah Islam, jual beli secara borongan atau tebasan ini dikenal dengan istilah *jual beli jizaf*. Namun, Islam memberikan batasan dan larangan terhadap jual beli tebasan tanpa aturan yang jelas, karena dikhawatirkan hasil yang ditebas tidak sesuai dengan perkiraan atau spekulasi yang dilakukan,⁴³ sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kerugian salah satu pihak.

---

⁴³ Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Online Mahasiswa*

Sebagai salah satu bentuk muamalah yang sangat penting, jual beli jizaf memiliki peranan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat agraris. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa interaksi ekonomi, dan jual beli merupakan sarana utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam terminologi fiqh, *jizaf* berasal dari bahasa Persia yang bermakna mengambil dalam jumlah banyak tanpa harus menghitung, menimbang, atau menakar secara rinci terlebih dahulu.⁴⁴ Dengan kata lain, jual beli jizaf adalah transaksi barang yang jumlahnya sulit dihitung secara tepat sehingga dilakukan secara borongan berdasarkan taksiran atau estimasi setelah melihat kondisi barang secara subjektif.

Dalam mazhab Malikiyah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli jizaf ini dianggap sah dan sesuai dengan syariat, antara lain:

1. Ketidaktahuan Kedua Pihak atas Ukuran dan Kadar Barang Penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui secara pasti ukuran, kadar, atau jumlah barang yang diperjualbelikan. Jika salah satu pihak mengetahui secara pasti maka jual beli jizaf tidak sah karena tidak memenuhi asas keadilan dan keterbukaan.
2. Jumlah Barang Tidak Sedikit dan Tidak Terlalu Banyak
Barang yang diperjualbelikan harus dalam jumlah yang cukup besar sehingga sulit untuk dihitung secara tepat, namun tidak boleh terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan taksiran secara wajar.
3. Tempat Penempatan Barang Harus Datar dan Terbuka
Tempat atau permukaan tempat peletakan barang harus datar dan terbuka untuk meminimalisir kemungkinan manipulasi atau kecurangan dalam taksiran.
4. Barang Harus Dijaga dari Perusakan atau Perubahan
Barang yang diperjualbelikan harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan, penambahan, atau pengurangan selama masa transaksi, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap terjaga.

(JOM) *Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 No. 2 (2022): 95-105.

⁴⁴ Mudrikul Khoiri, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Objek Jual Beli* (Ar-Raniry Repository, 2023).

Syarat-syarat tersebut merupakan upaya untuk menjaga keadilan dan menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam jual beli jizaf. Selain itu, pembeli harus dapat melihat barang secara langsung dengan mata kepala sendiri sebelum melakukan akad, sehingga tidak terjadi penipuan atau kesalahpahaman.⁴⁵

Praktik jual beli jizaf sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah Islam, melainkan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini termaktub dalam sebuah hadits riwayat Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah, orang-orang pernah dipukul jika mereka membeli makanan secara taksiran kemudian menjualnya kembali di tempat yang sama tanpa terlebih dahulu membawa barang tersebut kepada keluarganya. Hadits ini menjadi dalil bahwa jual beli jizaf diperbolehkan, namun dengan ketentuan barang harus dipindahkan terlebih dahulu sebelum dijual kembali agar tidak menimbulkan spekulasi dan kerugian.

Jual beli tebasan atau jizaf dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan kondisi barang yang diperjualbelikan:

1. Jual Beli Buah yang Belum Terlihat

Jenis jual beli ini hukumnya haram dan batal karena menjual sesuatu yang belum ada secara nyata, sehingga mengandung unsur penipuan dan *gharar*.

2. Jual Beli Buah yang Sudah Terlihat dan Layak Panen

Menurut mazhab Hanafiyah, jual beli ini diperbolehkan selama tidak ada syarat yang memberatkan seperti *taqbiyah* (syarat buah tetap berada di pohon). Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan jual beli buah dengan atau tanpa syarat tersebut.⁴⁶

3. Jual Beli Buah yang Sudah Terlihat tetapi Belum Layak Panen

Jika dilakukan dengan syarat langsung memetik buah setelah akad (*qoth'i*), maka ulama sepakat membolehkan. Namun, jika buah dibiarkan sampai matang, mazhab

---

⁴⁵ Mudrikul Khoiri, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Objek Jual Beli* (Ar-Raniry Repository, 2023).

⁴⁶ Sahroni A. Karim, "Kompilasi Jual Beli Jizaf Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah," *I'tishom: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2024.

Syafi'i dan Hanafi melarang, kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak.

Praktik jual beli jizaf di era modern masih banyak ditemukan, terutama dalam transaksi pertanian dan perkebunan. Contohnya, petani menjual hasil panennya secara borongan kepada tengkulak atau pembeli yang melakukan taksiran berdasarkan pengalaman dan pengamatan langsung. Dalam penelitian di beberapa daerah, jual beli jizaf ini dinilai sah karena memenuhi syarat-syarat syariat dan rukun akad jual beli.⁴⁷

Secara hukum Islam, jual beli jizaf merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan selama memenuhi syarat yang ketat untuk menghindari unsur ketidakjelasan dan penipuan. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa selama objek jual beli dapat dilihat secara langsung, kedua pihak tidak mengetahui secara pasti jumlahnya, dan transaksi dilakukan secara borongan dengan taksiran yang wajar, maka akad jual beli tersebut sah dan mengikat.

Penerapan syarat-syarat jual beli jizaf sangat penting untuk mencegah praktik penipuan dan manipulasi di lapangan. Berdasarkan kajian fiqh dan hasil penelitian lapangan, syarat-syarat tersebut meliputi antara lain: kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui secara pasti ukuran, kadar, atau jumlah barang yang diperjualbelikan; objek barang harus dapat dilihat secara langsung oleh pembeli saat akad; barang yang diperjualbelikan harus dalam jumlah yang cukup besar sehingga sulit untuk dihitung secara rinci, namun tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan taksiran yang wajar; serta tempat penempatan barang harus datar dan terjaga agar tidak terjadi manipulasi kuantitas atau kualitas barang.⁴⁸

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, potensi terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dan penipuan dapat diminimalisir. Ketidakjelasan dalam jumlah atau kualitas barang sering kali menjadi sumber konflik dan ketidakadilan dalam transaksi. Ketika kedua pihak sama-sama tidak mengetahui ukuran pasti barang dan hanya mengandalkan

---

⁴⁷ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

⁴⁸ Rosminta, dkk., "Praktik Jual Beli Ikan Sistem Jizaf Dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus di Kaduara Barat Pamekasan)," *El-Nubuwwah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 144-161.

taksiran yang objektif, maka risiko manipulasi harga atau kuantitas dapat ditekan.⁴⁹ Selain itu, keharusan pembeli melihat langsung barang yang akan dibeli juga mengurangi kemungkinan penipuan terkait kondisi barang. Meskipun rukun jual beli telah terpenuhi, sering kali terdapat pelanggaran syarat, terutama terkait objek akad yang mengandung unsur penipuan dalam penumpukan barang. Hal ini mengindikasikan pentingnya penerapan syarat secara ketat agar jual beli jizaf benar-benar mencerminkan keadilan dan kejujuran sesuai prinsip syariah.

Selain itu, syarat bahwa barang harus dipindahkan dari tempat asalnya sebelum dijual kembali (sebagaimana dicontohkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW) juga berfungsi untuk mencegah spekulasi dan penjualan ganda yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, Penerapan syarat jual beli jizaf yang ketat dan jelas merupakan mekanisme efektif untuk mencegah praktik penipuan dan manipulasi di lapangan.

---

⁴⁹ Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Ekonomi Syari’ah*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 105